

# Inkoma Wawasan Kebangsaan

*by* Edy Dwi

---

**Submission date:** 28-Apr-2020 11:04AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1309888929

**File name:** INKOMA\_WAWASAN\_KEBANGSAAN.docx (24.17K)

**Word count:** 1801

**Character count:** 12387

## WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

---

Edy Dwi Kurniati

**Abstrak:** Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menyeluruh dalam berbangsa dan bernegara demi kepentingan nasional. Ini berarti setiap warga negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Wawasan kebangsaan ini sangat diperluk dan harus selalu menjadi bagian hidup Bangsa Indonesia yang bercorak pluralistis yakni terdiri dari berbagai suku, etnis, bahasa, adat, kepercayaan dan hidup terpencar-pencar ke beberapa pulau dengan masing-masing memiliki kebudayaan sendiri

**Kata kunci:** wawasan, perjuangan, pembangunan

### A. PENDAHULUAN

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sebelum, selama penjajahan, dan pada era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan pengisian kemerdekaan menuntut kondisi dan penanganan yang berbeda sesuai dengan jamannya. Modal untuk menanggapi kondisi tersebut tentu didasarkan pada nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa tersebut yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjuangan tersebut pada akhirnya menemui titik kritis karena pengaruh globalisasi.

4  
Globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan global. Kondisi semacam ini akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju dan negara berkembang. Antara negara berkembang dengan lembaga internasional maupun antar negara berkembang termasuk didalamnya Negara Kesatuan Negara republik Indonesia (NKRI).

Bangsa Indonesia bercorak pluralistis yakni terdiri dari berbagai suku, etnis, bahasa, adat, kepercayaan dan hidup terpencar-pencar ke beberapa pulau dengan masing-masing memiliki kebudayaan sendiri. Dengan sifat dinamika masyarakat yang plural semacam itu ternyata mampu dipersatukan dalam perjuangan pembentukan bangsa sehingga suku-suku bangsa tersebut memiliki dan mendiami wilayah negara dengan 9  
sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, gaya hidup dalam identitas yang sama dalam Negara Kesatuan republik Indonesia.

Beberapa tahun berlalu, citra persatuan dan kesatuan Indonesia pada saat ini cukup memprihatinkan. Apa yang sudah dicapai dan diperjuangkan di masa lalu terkesan diabaikan dengan dalih melakukan reformasi. Semangat dan nilai-nilai perjuangan menjadi surut bahkan muncul kekhawatiran terjadi disintegrasi bangsa. Untuk memperkuat tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa ada baiknya direview kembali semangat perjuangan bangsa pada masa perjuangan fisik. Semangat perjuangan tersebut mampu mempersatukan perbedaan maupun pluralisme yang kemudian dapat mewujudkan lahirnya NKRI ini. Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan

mental spiritual pada saat itu memang telah melahirkan kekuatan luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan <sup>11</sup> perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan inipun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sehingga kita tetap memiliki <sup>16</sup> wawasan dan kesadaran berbangsa, bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara dan tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Sebagai suatu bangsa harus meyakini bahwa kebenaran yang hakiki adalah yang datang dari Tuhan pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran dan budi nuraninya. Namun kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki tingkat kemampuan yang sama. Ketidak samaan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, kehidupan, kepercayaan dalam hubungan dengan penciptanya dan melaksanakan hubungan dengan sesamanya dan cara melihat serta memahami sesuatu. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dinamakan keanekaragaman. Dalam konteks kebangsaan, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya.

Bangsa yang menegara dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh tersebut timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam wilayah serta pengalaman sejarah.

Pemerintah dan rakyat perlu konsep yang berupa wawasan kebangsaan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan tersebut untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata wawasan itu sendiri berasal dari *wawas* (Bahasa Jawa artinya melihat, memandang). Dengan penambahan akhiran "an" kata ini secara harafiah berarti cara penglihatan atau cara pandang. Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Oleh sebab itu wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dan dalam mengejar kejayaannya. Wawasan kebangsaan berarti cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunan di lingkungan nasional (termasuk lokal maupun propinsional), regional serta global.

Hakekat wawasan kebangsaan berarti keutuhan sebagai bangsa dalam arti cara pandang yang menyeluruh dalam berbangsa dan bernegara secara utuh demi kepentingan nasional. Ini berarti setiap warga negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan dan orang perorang. Asas wawasan kebangsaan ini adalah terdiri dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersasma. Harus disadari jika

asas ini diabaikan komponen pembentuk kesepakatan bersama tersebut akan dapat tercerai berai.

Sebagai visi nasional, wawasan kebangsaan Indonesia harus menjadi pedoman bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan NKRI. Sehingga setiap individu perlu <sup>1</sup> pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan nasional. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesungguhnya adalah pengembangan semangat demokrasi, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian landasan filosofi yang melatarbelakangi lahirnya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun harus diakui bahwa penyusunan UU tersebut dipengaruhi *euforia* demokrasi yang tidak terkendali dan dipacu perubahan kondisi politik yang begitu cepat. Akibatnya, upaya mengatur kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kurangsempurna, baik dalam menafsirkan isi dan substansi UU tersebut, maupun pada implementasinya di lapangan. Dari pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai persoalan yang cenderung kompleks dan multidimensional. Berbagai kalangan telah memprediksi akan terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan pengkotak-kotakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi pengelolaan pemerintahan daerah, kemudian hubungan serasi <sup>15</sup> antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terpelihara. Akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa melemah dan menimbulkan disintegrasi bangsa. Fenomena-fenomena tersebut menjadi isu penting yang pantas mendapat perhatian serius. Masih banyak isu strategis dalam konteks kerjasama sektoral dan daerah. Karena itu isu-isu tersebut mesti diletakkan dalam kerangka kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dan dikaji secara mendalam. Pertimbangannya adalah, *pertama*, pembangunan di masa lalu sarat dengan sentralisme;

semua otoritas pembangunan berada di tangan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. *Kedua*, disadari bahwa kelembagaan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah memiliki urgensi tinggi, tetapi kerjasama tersebut sebenarnya belum memiliki format ideal. *Ketiga*, ketidakjelasan arah kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dapat menjadi ancaman nyata terhadap masa depan integrasi nasional dan prospek otonomi daerah.

Dalam Pembangunan Daerah Wawasan Kebangsaan ini penting untuk memperkokoh, dan mampu bertahan dari terpaan nilai global yang selalu menantang antara lain yang berkaitan dengan: pemberdayaan rakyat secara optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme dan kesadaran warga negara.

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

- a. John Naisbit dalam bukunya *Global Paradox* menulis “*to be a global powers, the company must give more role to the smallest part*”
- b. Pembangunan yang belum merata sehingga ada daerah tertinggal dan timbul keterbelakangan (kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat)
- c. Jika dibiarkan menjadi ancaman, sehingga perlu prioritas utama pengentasan kemiskinan sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan diseluruh aspek kehidupan. Pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

### **2. Dunia Tanpa Batas**

- a. Perkembangan IPTEK maju pesat khususnya teknologi informasi, komunikasi transportasi, dunia seakan menjadi kampoeng dunia yg transparan tanpa mengenal batas negara. Hal ini berdampak pd aspek kehidupan bermasyarakat, berbagai dan

bernegara. Serta mempengaruhi pola pikir, pola sikap, pola tindak. Keterbatasan SDM Indonesia di bidang IPTEK merupakan tantangan serius karena ini salah satu indikator nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global

- b. Kenichi Omahe dlm bukunya *Bordelless World* dan *The End of Nation State* mengatakan Dalam perkembangan masyarakat global batas wilayah dalam arti geografi dan pol relatif masih tetap namun kehidupan negara tidak dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, konsumen yg makin individualistis, sehingga peran pembangunan daerah harus lebih besar supaya hasil pembangunan lebih mampu meningkatkan kekuatan bangsa di percaturan dunia.

### **3. Era Baru Kapitalisme**

- a. Sloan dan Zureker dalam bukunya *Dictionary of Economics menjelaskan kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berdasar hak milik.*
- b. Di era baru kapitalisme sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat perlu strategi baru yaitu keseimbangan (Lester Thurow dalam bukunya *The Future of Capitalism*)
- c. Kapitalisme yang semula dipraktekkan untuk keuntungan sendiri sekarang menjadi strategi baru untuk menekan negara berkembang termasuk Indonesia melalui isu global.

### **4. Kesadaran Warga Negara**

- a. Kewajiban, hak dan kedudukan warga negara bisa dibedakan namun tidak dapat dipisahkan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.

- A. Saat ini warga negara perlu memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, KKN. Harus menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas SDM serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- B. Persatuan dan kesat dalam perjuangan non fisik saat ini menurun dibanding per fisik dalam bela negara dengan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sehingga mengarah kepada disintegrasi bangsa.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dalam era globalisasi saat ini semangat perjuangan bangsa masih relevan untuk dipergunakan sebagai alat untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Secara implementatif semangat perjuangan yang perlu dipakai sebagai dasar melaksanakan pembangunan bangsa dalam wadan NKRI pada masa reformasi ini adalah wawasan kebangsaan.

Sebagai visi negara, wawasan kebangsaan perlu dijelaskan sebagai suatu upaya setiap Warga Negara Indonesia yang harus selalu menumbuhkan persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, serta sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa. Kualitas warga negara tergantung dari keyakinan dan pegangan hidup mereka dlm bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang saat ini dirasakan sebagai konsep demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam Pembangunan Daerah Wawasan Kebangsaan ini penting untuk memperkokoh, dan mampu bertahan dari terpaan nilai global yang selalu menantang antara lain yang berkaitan dengan: pemberdayaan rakyat secara optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme dan kesadaran warga Negara.

## 2. Saran

Atas dasar simpulan di atas, dapat direkomendasikan bahwa pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian pembangunan daerah harus mengacu pada wawasan kebangsaan. Pembangunan daerah harus menghindari egoisme lokal dan primardialismedaerah dan kesukuan. Dengan model tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani Ruslan, 1998, Makalah Seminar Nasional , KAGAMA,8 Juli 1998, Yogyakarta

Budiardjo, Miriam, 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

Driyarkara, 1978, Percikan Filsafat, pembangunan Nasional, Jakarta

# Inkoma Wawasan Kebangsaan

## ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

yusufsetiono.blogspot.com

Internet Source

3%

2

farrasnia-  
pendidikanewarganegaraan.blogspot.com

Internet Source

3%

3

fakhri27naufal.blogspot.com

Internet Source

2%

4

www.coursehero.com

Internet Source

2%

5

www.jdih.setjen.kemendagri.go.id

Internet Source

1%

6

hesbonfn.blogspot.com

Internet Source

1%

7

galihilag.blogspot.com

Internet Source

1%

8

radenwiratman46.blogspot.com

Internet Source

1%

9

vdocuments.site

10

Submitted to Universitas Dian Nuswantoro

Student Paper

1%

11

ahmadnugroho1994.blogspot.com

Internet Source

1%

12

adityasuryakusuma.blogspot.com

Internet Source

1%

13

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

14

slideplayer.info

Internet Source

1%

15

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

1%

16

yuddhadb13.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

&lt; 1%

Exclude bibliography

On

# Inkoma Wawasan Kebangsaan

## GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9